

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lanskap tantangan masyarakat luas, kemiskinan menjadi isu yang bergema di masyarakat. Implikasi daripada kemiskinan merasuki setiap aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pencapaian pendidikan, tingkat kesehatan, pembangunan ekonomi, stabilitas politik, hingga mobilitas sosial (Lang *et al.*, 2024). Pengentasan tingkat kemiskinan menjadi persoalan sebagian besar negara, terutama pada negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia. Dalam melakukan pengentasan kemiskinan, Indonesia menetapkan kemiskinan menjadi salah satu tujuan daripada *SDGs (Sustainable Development Goals)* yaitu “*End poverty in all its form everywhere*” (Nainggolan, 2020). Banyaknya faktor yang berkontribusi terhadap kemiskinan menjadikan tingkat kemiskinan sebagai indikator penting dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan di berbagai daerah di Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang memiliki 38 provinsi, penerapan otonomi daerah diharapkan dapat membuat pemerintah daerah lebih responsif dalam mengatasi masalah kemiskinan di tingkat regional.

Upaya mengurangi kemiskinan perlu dilakukan secara terkoordinasi, sesuai dengan prioritas dan kebutuhan tiap regional. Efektivitas untuk menurunkan tingkat kemiskinan atau akumulasi penduduk miskin menjadi langkah kunci dalam menentukan strategi atau instrumen pembangunan di suatu wilayah. Peranan pemerintah daerah dalam mengurangi tingkat kemiskinan pada wilayahnya merupakan hal yang bersifat wajib dan mutlak.

Hal ini mendorong seluruh daerah untuk melaksanakan kewajiban tersebut dengan mempercepat proses pembangunan sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat serta penurunan tingkat kemiskinan dalam suatu daerah (Sianipar, Masinambow and Lapian, 2022)

Sumatera Utara merupakan daerah yang berada pada Pulau Sumatera. Secara geografis, Wilayah Sumatera Utara pada bagian utara Pulau Sumatera, Indonesia, dengan koordinat geografis antara 1°LU- 4°LU serta 98°BT – 100° BT, memiliki luas sekitar 72.981,23 km, yang mencakup sekitar 3,72% total luas dari wilayah Negara Indonesia. Batas wilayah Provinsi Sumatera Utara meliputi:

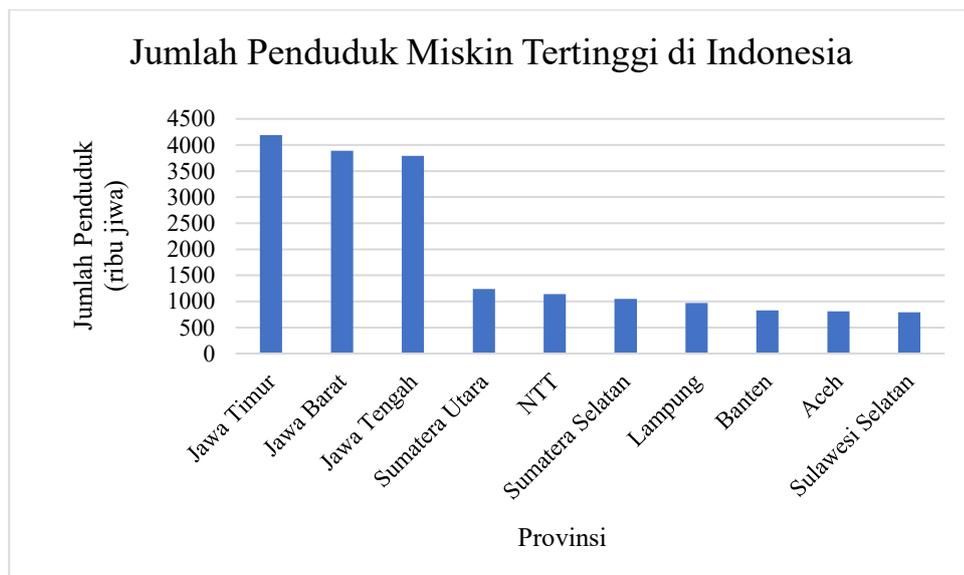
Utara : Provinsi Aceh

Selatan : Provinsi Riau dan Sumatera Barat

Barat : Samudera Hindia

Timur : Selat Malaka

Gambar 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin Tertinggi di Indonesia



Sumber: Badan Pusat Statistika, 2024

Sesuai data Badan Pusat Statistika (BPS) tahun 2023 seperti gambar 1.1 Provinsi Sumatera Utara menempati peringkat empat akumulasi penduduk miskin tertinggi di Indonesia dengan jumlah sebanyak 1.239,71 ribu jiwa. Angka ini mencerminkan tantangan serius yang dihadapi Provinsi Sumatera Utara dalam upaya pengentasan kemiskinan. Upaya untuk mengatasi kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam membangun perkonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun memiliki sumber daya alam melimpah, seperti sektor perkebunan, pertanian, serta potensi pariwisata, masih banyak masyarakat yang terjebak dalam siklus kemiskinan.

Gambar 1. 2 Tingkat Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara 2024

Persentase masyarakat kelompok miskin Wilayah Sumatera Utara mnecapai 9,01% pada tahun 2021, ini mengalami kenaikan sebesar 0,26% dari tahun 2020. Sedangkan selama dua tahun terakhir, persentase kemiskinan di

Provinsi Sumatera Utara menghadapi penyusutan menjadi 8,42% di tahun 2022 dan 8,15% di tahun 2023. Meskipun terdapat penurunan, namun penurunan persentase penduduk miskin tersebut menunjukkan penurunan yang relatif lambat dari tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam usaha mengurangi kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Data di atas menunjukkan perlu adanya pemahaman faktor-faktor yang menjadi pengaruh terhadap kemiskinan Provinsi Sumatera Utara.

Gambar 1. 3 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Utara



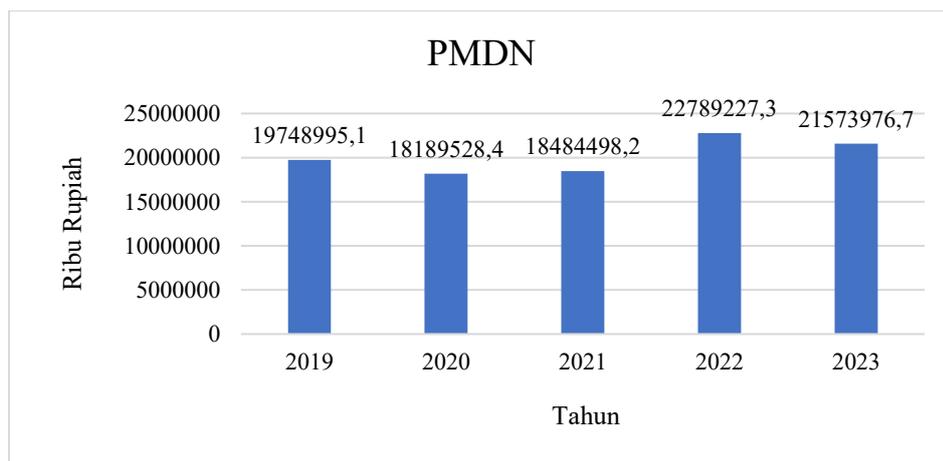
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara 2024

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka), merupakan faktor yang berkontribusi dalam tingkat kemiskinan. Tingkat pengangguran dengan nilai tinggi berarti lebih banyak individu di suatu daerah yang tidak memiliki sumber pendapatan, sehingga pendapatan keseluruhan rumah tangga ikut menurun. Tingkat pengangguran terbuka yang tinggi menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang signifikan antara jumlah pekerjaan yang tersedia dan jumlah individu yang siap bekerja sehingga menjadi penyebab masalah

struktural dalam ekonomi. Kondisi ini menyebabkan orang-orang yang tidak memiliki sumber pendapatan mengalami masalah dalam mencukupi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, serta kesehatan, yang bisa membuat mereka lebih rentan terhadap kemiskinan.

Grafik pada gambar 1.3 menunjukkan TPT Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2019 hingga 2023. Lima tahun terakhir, TPT terendah pada tahun 2019 yaitu sebesar 5,39%. Namun, pada tahun 2020, terjadi lonjakan signifikan hingga mencapai 6,91%. Setelahnya, tingkat pengangguran kembali menurun, meskipun tidak signifikan selama tiga tahun terakhir. Rata-rata penurunan TPT selama tiga tahun terakhir hanya sebesar 0,22%. Penurunan ini belum bisa kembali seperti sebelum adanya lonjakan pada tahun 2020, yang artinya selama tiga tahun terakhir pemerintah belum berhasil mengembalikan kondisi akibat lonjakan selama satu tahun sebelumnya. Tahun 2020 TPT mengalami kenaikan namun tingkat kemiskinan justru mengalami penurunan pada tahun 2020.

Gambar 1. 4 PMDN Provinsi Sumatera Utara



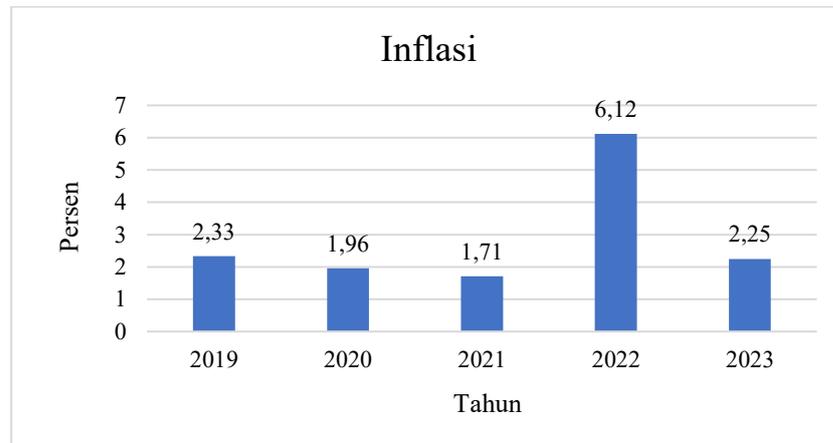
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

Faktor lain yang berperan dalam tingkat kemiskinan ialah nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Sebagai salah satu pilar dalam

pembangunan ekonomi, PMDN berkontribusi dalam upaya pengurangan kemiskinan. Dengan meningkatkan investasi domestik, maka akan lebih banyak peluang kerja tersedia, hal ini akan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah yang rentan terhadap kemiskinan.

PMDN sering kali berfokus pada sektor-sektor strategis di daerahnya, sektor-sektor ini membantu penyerapan tenaga kerja dari kelompok masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan. Saat masyarakat memiliki akses ke pekerjaan yang baik dan pendapatan yang konsisten, mereka dapat berinvestasi dalam pendidikan dan kesehatan, yang merupakan elemen kunci untuk memutus siklus kemiskinan.

PMDN (Nilai Penanaman Modal Dalam Negeri) di Wilayah Sumatera Utara 2019 hingga 2023 mencerminkan tren positif. Namun pada tahun 2023 mengalami penurunan nilai PMDN sebesar 1.215.250,6 dari 22.789.227,30 di tahun 2022 menjadi 21.573.976,70 di tahun 2023. Padahal nilai PMDN sebelumnya sudah mengalami peningkatan beruntun selama dua tahun yaitu tahun 2021 dan 2022, bahkan nilai investasi domestik PMDN tahun 2022 sudah mencapai nilai tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini mengejutkan, mengingat tren positif yang telah berlangsung sebelumnya dan adanya penurunan tingkat kemiskinan disaat adanya penurunan PMDN.

Gambar 1. 5 Inflasi Provinsi Sumatera Utara

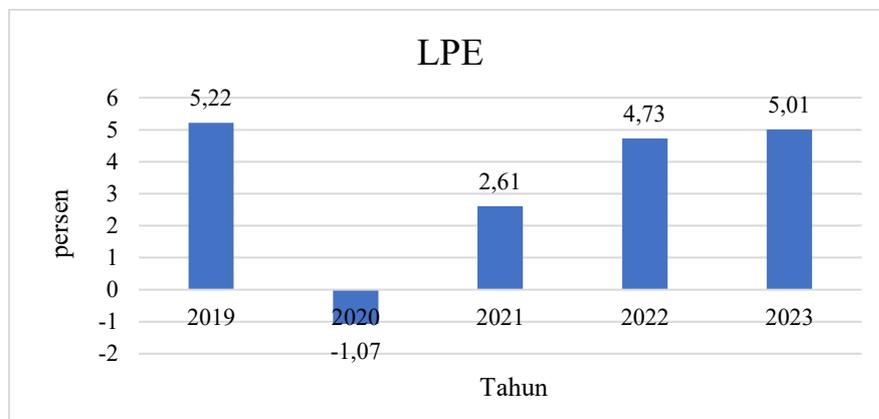
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

Inflasi merupakan faktor lain selain TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) serta PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) yang berkontribusi dalam peningkatan kemiskinan. Inflasi, yang ditandai dengan peningkatan harga barang dan jasa, berdampak pada tingkat kemiskinan. Ketika harga meningkat, daya beli masyarakat turun, maka membuat masyarakat semakin tertekan. Biaya hidup yang lebih tinggi tanpa diimbangi dengan kenaikan pendapatan memperburuk kondisi masyarakat terutama yang tergolong masyarakat miskin, hal ini menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang menghambat investasi dan pertumbuhan lapangan kerja. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak keluarga yang terpaksa berhutang, ini hanya akan menambah beban keuangan bagi masyarakat itu sendiri. Utang yang menumpuk sering kali menciptakan siklus kemiskinan yang sulit untuk diputus.

Grafik inflasi Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 hingga tahun 2023 pada gambar 1.4 mencatat penurunan inflasi mulai dari tahun 2019 hingga nilai terendah pada tahun 2021 sebesar 1,71%. Namun inflasi kembali meningkat

pada tahun 2022. Menariknya, tahun 2023, inflasi memperlihatkan penurunan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, nilai penurunan ini tidak lebih besar dari kenaikan nilai inflasi sebelumnya. Adanya kenaikan inflasi yang signifikan pada tahun 2022 justru diimbangi dengan turunnya tingkat kemiskinan di Sumatera Utara. Jika dilihat trend secara umum dari tahun 2019 hingga tahun 2023, nilai inflasi Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi signifikan.

Gambar 1. 6 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Tahun



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

Laju pertumbuhan ekonomi adalah hal kompleks pada tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi baik, diukur lewat perkembangan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), dapat menciptakan peluang kerja serta meningkatkan penghasilan masyarakat, sehingga berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif akan menjadi penyebab kemiskinan tetap tinggi bahkan meningkat.

Grafik pada gambar 1.6 memperlihatkan laju pertumbuhan ekonomi wilayah Provinsi Sumatera Utara dari periode 2019 hingga 2023. Secara umum, laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan fluktuasi signifikan. Tahun

2019, LPE berada di angka tertinggi yaitu 5,22 persen, mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Namun, tahun 2020, terjadi penurunan signifikan menjadi -1,07 persen. Setelah itu, LPE mengalami pemulihan, dengan angka 2,61 persen pada 2021, meningkat lagi menjadi 4,73 persen tahun 2022 dan 5,01% pada tahun 2023. Meskipun terdapat pemulihan dari tahun 2021-2023, LPE Provinsi Sumatera Utara masih di bawah angka tertinggi sebelumnya. Kenaikan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2021 justru diiringi dengan kenaikan tingkat kemiskinan di Sumatera Utara.

Dengan meneliti faktor-faktor tersebut, studi ini bisa memberikan wawasan yang lebih jelas mengenai pengaruh keadaan ekonomi terhadap angka kemiskinan. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat memperburuk masalah kemiskinan. Di sisi lain, investasi lokal dapat berpotensi menciptakan pekerjaan baru dan meningkatkan penghasilan masyarakat. Selain itu, inflasi yang terjaga bisa memengaruhi daya beli masyarakat serta memperburuk kondisi ekonomi bagi kelompok yang rentan. Memahami pengaruh variabel-variabel, penelitian ini bisa dijadikan landasan untuk merumuskan kebijakan lebih efektif dalam mengatasi kemiskinan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif pada Wilayah Sumatera Utara.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai masalah yang sudah dipaparkan, rumusan masalah yang bisa disimpulkan pada penelitian yaitu:

1. Apakah tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara?

2. Apakah penanaman modal dalam negeri berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara
3. Apakah inflasi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara?
4. Apakah laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.
2. Mengetahui pengaruh penanaman modal dalam negeri terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.
3. Mengetahui pengaruh inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.
4. Mengetahui pengaruh laju pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskina di Provinsi Sumatera Utara.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian untuk menjadikan fokus penelitian terhadap tujuan yang sudah ditetapkan. Tujuan penelitian yang lebih terarah dan hasil yang dapat bermanfaat dengan baik. Ruang lingkup pada penelitian guna mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat pengangguran terbuka, penanaman modal dalam negeri, inflasi, serta laju pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran khususnya untuk pengambilan kebijakan dalam pengentasan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.
2. Diharapkan dapat menambah acuan akademik dan koleksi perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta perpustakaan pusat di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Sebagai sumber informasi bagi pihak yang berkepentingan.